

## Peningkatan Kapasitas Mahasiswa dalam Perencanaan Pengadaan Aset Daerah

Andi Adhe Amalya<sup>1</sup>, Ahmad Difa Awlia Aslim<sup>2\*</sup>, Nurul Ayuni<sup>3</sup>, Mahrani<sup>4</sup>, Faisal Ardiansyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ahmaddifa.awlia@unm.ac.id](mailto:ahmaddifa.awlia@unm.ac.id)

**Abstract.** *Efficient and accountable management of regional property begins with targeted asset procurement planning. However, public asset administration learning in higher education often focuses on theoretical aspects without providing practical experience in simulating the preparation of Regional Asset Needs Plans (RKBMD). This community service activity aims to increase the capacity of 24 5th-semester Public Administration students in planning regional asset procurement in accordance with the latest regulations. The method applied was an experiential learning approach consisting of interactive training, document preparation, case study simulations, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The results showed a significant increase in participants' conceptual and technical understanding, with the average score increasing from 54.25 (pre-test) to 86.83 (post-test), yielding an N-Gain score of 0.71 (high category). Students demonstrated practical competence in identifying asset gaps, applying value-for-money principles, and finalizing standard RKBMD documents.*

**Keywords:** *Asset Management; Capacity Building; Procurement Planning; Public Administration; Regional Property*

**Abstrak.** Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efisien dan akuntabel berawal dari perencanaan pengadaan aset yang tepat sasaran. Namun, pembelajaran administrasi aset publik di perguruan tinggi sering kali berfokus pada aspek teoritis tanpa memberi pengalaman praktis dalam simulasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dalam merencanakan pengadaan aset daerah sesuai dengan regulasi terkini. Metode yang diterapkan adalah pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, terdiri atas pelatihan interaktif, penyusunan dokumen RKBMD, simulasi studi kasus, serta evaluasi berbasis *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikansi pemahaman konseptual dan teknis mahasiswa, rata-rata nilai mahasiswa meningkat dari 54,25 (*pre-test*) menjadi 86,83 (*post-test*) dengan pencapaian *N-Gain score* sebesar 0,71 (kategori tinggi). Mahasiswa mampu mengidentifikasi kesenjangan aset, menerapkan prinsip *value for money*, dan memfinalisasi dokumen RKBMD yang baku.

**Kata kunci:** Administrasi Publik; Barang Milik Daerah; Kapasitas Mahasiswa; Pembelajaran Praktis; Perencanaan Pengadaan

### 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tahap perencanaan pengadaan aset menjadi pilar utama yang sangat menentukan efektifitas pengalokasian anggaran belanja modal publik. Perencanaan pengadaan yang kurang cermat berpotensi memicu timbulnya pemborosan keuangan negara,

ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan kebutuhan operasional, hingga timbulnya potensi pelanggaran hukum saat proses audit keuangan daerah. Kerangka regulasi nasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap pengusulan pengadaan aset wajib didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang terukur dan terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara memegang peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia sektor publik yang adaptif dan berintegritas. Mahasiswa semester 5 yang memprogramkan mata kuliah administrasi aset publik diproyeksikan menjadi calon aparatur sipil negara maupun analis kebijakan publik. Namun demikian, realitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mendasar antara pemahaman normatif akademis dan dinamika praktis di lapangan. Pembelajaran di kelas umumnya masih didominasi oleh ceramah tekstual mengenai regulasi, tanpa memberikan ruang simulasi teknis bagi mahasiswa untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan aset secara riil. Akibatnya, mahasiswa sering kali mengalami kesulitan teknis dalam melakukan analisis kesenjangan aset, menentukan standar harga, hingga menyesuaikan kebutuhan aset berbasis prioritas pelayanan publik.

Urgensi dan kebaruan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terletak pada penerapan model simulasi terpadu perencanaan pengadaan aset daerah yang mengombinasikan transfer pengetahuan regulatif dengan praktik penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) secara langsung. Kegiatan ini secara khusus menyasar 24 mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara untuk memperoleh keterampilan teknis dan etika pengadaan aset sebelum memasuki dunia kerja. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan utama dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk mengukur peningkatan kapasitas konseptual dan teknis mahasiswa dalam merencanakan pengadaan aset daerah melalui intervensi pelatihan serta simulasi terstruktur.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pengembangan kapasitas di perguruan tinggi merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman teknis mahasiswa. Dalam konteks administrasi publik, pengembangan kapasitas tidak hanya berfokus pada penguasaan teori pemerintahan tetapi juga pada pembentukan kompetensi teknis operasional dan integritas etis. Perencanaan pengadaan aset daerah memerlukan pemahaman multidisiplin yang mencakup hukum administrasi negara, manajemen keuangan daerah, dan analisis kebijakan publik.

Teori pembelajaran berbasis pengalaman yang dikembangkan oleh Kolb (2014), menegaskan bahwa proses belajar yang efektif terjadi ketika mahasiswa terlibat langsung dalam siklus pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif. Pada konteks pengadaan aset publik, penerapan *experiential learning* memungkinkan mahasiswa menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola aset seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas melalui simulasi penyusunan dokumen perencanaan. Penelitian terdahulu oleh Rahmawati dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa simulasi studi kasus mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penyusunan RKBMD secara signifikan dibandingkan metode kuliah tunggal.

Siklus perencanaan pengadaan BMD berlandaskan pada analisis ketersediaan aset eksisting dan proyeksi kebutuhan OPD selama satu tahun. Proses ini mensyaratkan penerapan prinsip *value for money*, artinya setiap pengusulan aset harus memperhitungkan biaya siklus hidup aset, manfaat pelayanan, dan efisiensi anggaran belanja modal (Astuti & Setiawan, 2021). Dengan perencanaan berbasis kebutuhan yang rasional, potensi timbulnya penyimpangan administrasi maupun ketidaktepatan pengadaan dapat diminimalisir sejak dini.

### **3. METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian dirancang menggunakan desain penelitian *One-Group Pretest-Posttest Design* untuk mengukur peningkatan kapasitas mahasiswa sebelum dan sesudah intervensi pelatihan. Peserta terdiri atas 24 mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang memprogramkan mata kuliah administrasi aset publik. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 100 menit dengan bobot 2 SKS yang bertempat di ruang perkuliahan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar.

Kegiatan dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu pemetaan pengetahuan awal melalui *pre-test*, pemaparan materi regulasi pengadaan dan pengelolaan BMD, penyusunan dokumen usulan RKBMD berdasarkan skenario kasus organisasi perangkat daerah (6 kelompok, masing-masing terdiri atas 4 orang), serta *post-test* dan refleksi.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan dua instrumen utama, yaitu.

- 1) Tes tertulis terstruktur (*pre-test* dan *post-test*) berupa 20 soal pilihan ganda dan 2 soal studi kasus untuk menilai pemahaman konseptual serta regulatif mahasiswa
- 2) Lembar observasi penilaian kinerja kelompok untuk menilai kemampuan praktis penyusunan dokumen usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Data analisis yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif untuk menghitung nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test*. Untuk menentukan tingkat efektivitas peningkatan kapasitas mahasiswa, dilakukan perhitungan indeks *Normalized Gain* ( $N - Gain$ ) dengan rumus Hake (1998):

$$N - Gain = \frac{\text{Skor Post-Test} - \text{Skor Pre-Test}}{\text{Skor Maksimum (100)} - \text{Skor Pre-Test}}$$

Kriteria pengkategorian perolehan nilai  $N - Gain$  dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu nilai  $N - Gain \geq 0,70$  termasuk dalam kategori tinggi,  $0,30 \leq N - Gain < 0,70$  termasuk dalam kategori sedang, dan  $N - Gain < 0,30$  termasuk dalam kategori rendah. Uji beda rata-rata (*paired sample t-test*) juga diterapkan untuk menguji signifikansi perubahan skor mahasiswa sebelum dan sesudah kegiatan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses pengumpulan data pengabdian dilaksanakan di ruang perkuliahan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Intervensi pengabdian dilaksanakan melalui 4 tahapan utama, yaitu pemetaan pengetahuan awal (*pre-test*), pemaparan materi regulasi pengadaan dan pengelolaan BMD, penyusunan dokumen usulan RKBMD berdasarkan skenario kasus organisasi perangkat daerah (6 kelompok, masing-masing terdiri atas 4 orang), serta evaluasi akhir (*post-test*) dan refleksi.

**a. Pemetaan Pengetahuan Awal dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Mahasiswa**

Pada tahap awal (*pre-test*), hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman 24 mahasiswa mengenai perencanaan pengadaan BMD masih relatif terbatas dengan nilai rata-rata sebesar 54,25. Sebagian besar mahasiswa belum memahami secara mendalam perbedaan antara pengusulan pemeliharaan rutin dan pengadaan aset baru berbasis analisis kebutuhan.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh pemateri

Setelah diberikan pemaparan materi regulasi dan simulasi penyusunan dokumen pengadaan, dilakukan pengukuran ulang melalui *post-test*. Hasil analisis menunjukkan peningkatan rerata skor peserta menjadi 86,83. Ringkasan rekapitulasi hasil evaluasi sebelum dan sesudah intervensi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi *Pre-Test* dan *Post-Test* Peningkatan Kapasitas Mahasiswa

| Indikator Penilaian Kompetensi              | Rerata <i>Pre-Test</i> | Rerata <i>Post-Test</i> | Peningkatan (%) | Indeks <i>N-Gain</i> | Kategori <i>N-Gain</i> |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Pemahaman regulasi BMD dan PBJ              | 52,08                  | 88,54                   | +70,0%          | 0,76                 | Tinggi                 |
| Identifikasi dan analisis kebutuhan aset    | 58,33                  | 87,08                   | +49,3%          | 0,69                 | Sedang                 |
| Penyusunan format baku RKBMD                | 48,50                  | 84,17                   | +73,5%          | 0,69                 | Sedang                 |
| Penerapan etika dan akuntabilitas pengadaan | 58,08                  | 87,50                   | +50,7%          | 0,70                 | Tinggi                 |
| Rata-rata                                   | 54,25                  | 86,83                   | +60,1%          | 0,71                 | Tinggi                 |

Sumber: Data Pengabdian Kepada Masyarakat (2026).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, perolehan nilai  $N - Gain$  secara keseluruhan berada pada angka 0,71 yang menandakan bahwa kegiatan pelatihan dan penyusunan dokumen pengadaan aset daerah tergolong efektif dalam meningkatkan kapasitas mahasiswa pada kategori Tinggi (Hake, 1998). Hasil pengujian *paired sample t-test* menunjukkan nilai  $p < 0,001$  yang mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pengabdian.

**b. Capaian Keterampilan Penyusunan Dokumen RKBMD**

Selama sesi penyusunan dokumen RKBMD, 24 mahasiswa yang terbagi ke dalam 6 kelompok simulasi berhasil menyusun dokumen usulan RKBMD berdasarkan skenario kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor pelayanan publik. Penilaian portofolio kelompok menunjukkan bahwa seluruh kelompok mampu menyelesaikan tiga tahapan krusial perencanaan pengadaan aset, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menginventarisasi ketersediaan aset eksisting beserta status kondisinya (baik, rusak ringan, atau rusak berat)
- 2) Menganalisis rasio kebutuhan ideal aset berdasarkan jumlah pegawai dan beban kerja pelayanan
- 3) Menyusun tabel RKBMD baku yang mencakup kode barang, nama barang, jumlah usulan, spesifikasi teknis, dan pertimbangan kelayakan anggaran.



Gambar 2. Penyusunan dokumen usulan RKBMD

**c. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan *Value for Money***

Hal menarik yang terungkap dalam proses simulasi adalah tumbuhnya kesadaran etis mahasiswa. Mahasiswa tidak sekadar mengusulkan pengadaan aset dengan harga termurah, melainkan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional

jangka panjang dan kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Temuan ini memperkuat kajian Hidayat dan Kusuma (2023) serta Santoso dan Suryani (2022) yang menyatakan bahwa simulasi kasus nyata dalam pendidikan administrasi publik mampu menumbuhkan kepekaan kritis mahasiswa terhadap pencegahan pemborosan anggaran publik.

Implikasi terapan dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya model pembelajaran administrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan instansi pemerintah daerah. Dengan penguasaan teknis penyusunan RKBMD sejak bangku kuliah maka lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara akan memiliki kesiapan kompetensi yang lebih tinggi saat terjun dalam dunia kerja di sektor pemerintahan maupun lembaga publik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan berhasil meningkatkan kapasitas 24 mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dalam perencanaan pengadaan aset daerah. Peningkatan pemahaman mahasiswa terbukti secara signifikan melalui kenaikan rata-rata nilai peserta dari 54,25 pada *pre-test* menjadi 86,83 pada *post-test* dengan capaian indeks *N-Gain* sebesar 0,71 yang masuk dalam kategori tinggi. Mahasiswa berhasil menguasai landasan regulasi pengelolaan BMD, analisis kesenjangan kebutuhan aset, serta keterampilan praktis dalam menyusun dokumen RKBMD yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program studi mengintegrasikan modul simulasi penyusunan RKBMD ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait. Selain itu, rekomendasi untuk kegiatan mendatang adalah memperluas kemitraan strategis dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar mahasiswa dapat melakukan praktik analisis kebutuhan aset secara langsung pada dokumen perencanaan pemerintah daerah.

## **DAFTAR REFERENSI**

Astuti, P., & Setiawan, A. (2021). Penerapan prinsip value for money pada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1432>.

- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Hidayat, M., & Kusuma, A. W. (2023). Penguatan kompetensi mahasiswa administrasi publik melalui laboratorium simulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(2), 134–147. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i2.2890>.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rahmawati, E., & Setiawan, B. (2021). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam mendukung efisiensi anggaran belanja modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 22(2), 145–158. <https://doi.org/10.24843/JAKSP.2021.v22.i02.p04>.
- Santoso, H., & Suryani, I. (2022). Peran pendidikan etika sektor publik dalam mencegah fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Integrasi Kebijakan Publik*, 5(2), 77–89. <https://doi.org/10.31506/jikp.v5i2.13201>.